



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2158-2172

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Pemberitaan Media Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Melalui E-Clip

Kamelia Maulid<sup>1✉</sup>, Johar Permana<sup>2</sup>, Vidi Sukmayadi<sup>3</sup>

Ilmu Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia

Email: [kameliamaulid@upi.edu](mailto:kameliamaulid@upi.edu)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana media nasional menggambarkan kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kebijakan, tone berita, serta tindak lanjut yang mendominasi selama satu kuartal pertama 2023 seperti yang digambarkan media nasional. Untuk mengidentifikasi dan menguatkan tema-tema yang relevan dalam pemberitaan media mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penulis menggunakan pendekatan metode campuran (mixed-method) dengan memadukan analisis isi serta kualitatif wawancara semi-terstruktur. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat E-Clip. Temuan studi ini menunjukkan bahwa tema terkait kebijakan infrastruktur mendominasi pada kuartal pertama tahun 2023. Secara umum, pemberitaan media sebagian besar bersifat netral. Selain itu, penggunaan E-clip sebagai inisiatif pemerintah provinsi untuk memantau media juga berperan penting dalam memfasilitasi respons cepat dan tindakan yang tepat dalam menanggapi isu-isu yang disorot media.

Kata Kunci: *Analisis Konten, E-Clip, Media, Tone, Pemberitaan, Kebijakan*

## Abstract

This study investigates how the national media depict the policies implemented by the provincial government of West Java. This study seeks to identify the policies, news tones, and subsequent actions that dominated the discourse during the first quarter of 2023 as depicted in the national media. To identify and corroborate the prevalent themes in media coverage regarding the policies of the West Java Provincial Government, the authors employed a mixed-method approach by combining content analysis along with qualitative semi-structured interviews. The data was collected using the E-Clip tool. The findings of this study indicate that themes related to infrastructure policies dominated the first quarter of 2023. Generally, the tone of the media news coverage were predominantly neutral. In addition, the use of E-clip as a provincial government initiative for media monitoring was significant in facilitating prompt responses and appropriate actions in response to media-highlighted issues.

Keywords: *Content analysis, E-Clip, Media Tone, News, Policy*

## PENDAHULUAN

Komunikasi pemerintahan saat ini terus dikembangkan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi komunikasi (TIK) yang kian meningkat. Baik pemerintah pusat atau daerah serta kepala daerah, terus mengadopsi penggunaan media untuk memberikan informasi terkait dengan kebijakan serta memperoleh *feedback* dari masyarakat (Rahmawati, 2020). Pemerintah memanfaatkan penggunaan komunikasi tersebut melalui komunikasi massa yang dituangkan ke dalam bentuk media massa. Hadirnya media massa dapat meningkatkan paparan informasi kinerja pemerintah melalui sejumlah pemberitaan apalagi ditambah dengan media *online* (Sunarti, 2021).

Media massa menjadi jembatan pemerintah menyebarkan pemberitaan kebijakan kepada publik. Sebagai contoh pada saat Pandemi Covid-19 dimana media massa menggunakan *agenda setting* (Sunarti, 2021) dan *framing* dalam setiap judul berita (Argawidyanti, 2022). Hal tersebut saling berkaitan karena penggunaan agenda setting serta framing mampu mempengaruhi peningkatan dukungan bagi kebijakan pemerintah saat pandemi. Maka pemerintah akan selalu membutuhkan peran media sebagai tempat untuk mensosialisasikan kebijakannya. Media sendiri membutuhkan pemerintah sebagai tempat sumber beritanya (Nan, 2022).

Untuk memantau jalannya kinerja dan komunikasi pemerintah, media juga berperan sebagai *watch dog* untuk mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah (Amini, 2022). Burke mengungkapkan media dianggap memiliki *power* keempat sesudah legislatif, eksekutif, serta yudikatif, media sebagai kekuatan untuk memastikan keseimbangan dan *recheck* dari kekuasaan yang ada (Mauliansyah, 2018). Sejalan dengan media sebagai *watch dog*, media mengawasi dan perlu andil dalam mendewasakan masyarakat Jawa Barat dalam

mengolah informasi. Media bertanggung jawab menyampaikan informasi yang benar untuk menjaga transisi kekuasaan agar aman, tenteram, dan melanjutkan pembangunan (Humas Jabar, 2019)

Hadirnya peranan media sebagai *watch dog* juga menyoroti Provinsi Jawa Barat. Menimbulkan banyak pemberitaan terkait Jawa Barat, seperti ketika Jabar meraih sejumlah prestasi, baik dalam skala nasional maupun internasional, di antaranya berhasil memperoleh penghargaan sebagai provinsi pertama yang permanen melaksanakan *work from home*, secara menyeluruh di Indonesia yang mengurangi kemacetan lalu lintas, polusi udara, serta Jabar tetap bersinergi produktif. Bahkan, prestasi Jabar memperoleh 550 penghargaan nasional serta internasional selama lima tahun pemerintahan (Teguh, 2023).

Selain itu, Jabar juga disoroti terkait dengan prestasi pembangunannya. Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar telah berhasil menghilangkan desa miskin yang awalnya ribuan menjadi nol selama 4 tahun. Reformasi dan birokrasi Pemprov Jabar adalah yang terbaik se-Indonesia. Dua pencapaian yang paling signifikan adalah stabilitas ekonomi Jabar terbaik, serta pembangunan infrastruktur Tol Cisumdawu dibersamai dengan Bandara Kertajati yang sudah beroperasi selama lima tahun pemerintahan (Tempo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa media memandang Jabar melalui pemberitaan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan komunikasi publik yang dipakai oleh pemerintah dapat menentukan arah narasi pemberitaan media.

Dari hal di atas, diketahui Pemprov Jabar memanfaatkan media untuk menyampaikan informasi kebijakan programnya kepada publik (RKPD Pemprov Jabar, 2021). Sebagai contoh, Pemprov Jabar lebih memanfaatkan penggunaan media adalah perbandingannya dengan Pemprov DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Indonesia sehingga seharusnya menjadi pusat pemberitaan media. Namun, berdasarkan data yang diperoleh pada analisis Google Trends (2023) data perbandingan antara jumlah pemberitaan Pemprov Jabar dengan Pemprov DKI Jakarta dalam kurun waktu bulan Juli hingga September 2023, ditemukan hasil bahwa Pemprov Jabar memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta yang mana Jabar lebih memanfaatkan penggunaan media dengan baik untuk menyebarluaskan informasi.

Seiring dengan perkembangan pemberitaan mengenai Pemprov Jabar yang kian meningkat, diperlukan adanya wadah untuk mengelola pemberitaan tersebut. Pemprov Jabar menciptakan aplikasi yang dinamakan E-Clip yang digunakan untuk memantau pemberitaan pada media massa berbasis elektronik, terkait pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan yang dikhususkan di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan teori *agenda setting* sebagai sumber dasar yang dipakai dalam menganalisis pemberitaan media kebijakan Pemprov Jabar yang diteliti dalam konteks penelitian ini. Teori ini digunakan sebagai asumsi utama yang asumsinya diuji dalam penelitian ini. Teori *agenda setting* yang dibentuk oleh Combs dan Shaw (dalam Agustina dan Irwansyah, 2017) menyatakan isu yang dinilai penting pada media massa akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan sebenarnya masyarakat mengetahui mengenai isu-isu apa saja yang terjadi serta bagaimana isu tersebut disusun dengan tingkat kepentingannya.

Berdasarkan kajian di atas, terlihat adanya sebuah celah penelitian, dimana Pemprov Jabar memiliki banyak prestasi pada pemberitaan. Namun hanya berfokus pada bagaimana media memandangnya. Untuk itu, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan mengkaji analisis pemberitaan media terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui E-Clip sebagai aplikasi analisis pemberitaan pemerintah. Untuk mengeksplorasi tema kebijakan pemberitaan yang lebih dominan, kemudian disaring permasalahan penelitian, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa kebijakan paling mendominasi selama kuartal pertama tahun 2023?
2. Apa tone pemberitaan yang paling mendominasi selama kuartal pertama tahun 2023?
3. Bagaimana tindak lanjut dari pemberitaan yang paling mendominasi selama kuartal pertama tahun 2023?

Untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian ini, studi kasus dan analisis isi pemberitaan digunakan sebagai metode penelitian. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk rekomendasi bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan peneliti yang fokus pada pemberitaan kebijakan dalam memanfaatkan peran media.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan metodologi campuran yang terdiri dari analisis isi agenda setting, studi kasus (Mulyana, 2003), dan metode wawancara kualitatif (Brooks et al., 1996). Pendekatan ini memadukan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, serta obyektif.

Creswell (2013) mengungkapkan bahwa penelitian dengan metode campuran terjadi ketika peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan dan menarik kesimpulan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian untuk mendapatkan analisis lebih komprehensif. Penelitian ini memakai metode campuran karena untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam terkait dengan

analisis pemberitaan media terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui E-Clip. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan dua tahapan di antaranya:

#### Tahapan Pendekatan Kuantitatif

Pada tahapan kuantitatif, melakukan analisis isi pemberitaan media melalui E-Clip Jabar. Penulis melakukan analisis isi pemberitaan media dengan *agenda setting* untuk menyelidiki kebijakan yang mendominasi selama satu kuartal pertama tahun 2023 dan tone berita paling banyak yang diproyeksikan melalui E-Clip.

Dalam analisis isi kuantitatif (Kriyantoro, 2006), peneliti memastikan unit yang dianalisis, menggolongkan subjek diteliti lebih dalam melalui teks, pesan, media yang digunakan. Analisis isi sebagai teknik penelitian ilmiah untuk mengetahui bagaimana karakteristik serta menarik inferensi isi tersebut (Eriyanto, 2011). Penulis menganalisis data pemberitaan E-Clip selama empat bulan dari bulan Januari hingga April 2023. Rentang waktu selama empat bulan tersebut dipilih karena merupakan awal tahun serta memasuki tahun terakhir periode pemerintahan Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul. Selain itu, waktu tersebut dipilih karena perangkat E-Clip ditutup sementara karena *maintenance*, sehingga E-Clip hanya beroperasi hingga April 2023. Penelitian kuantitatif didasarkan pada indikator isi pemberitaan; tema pemberitaan (infrastruktur, sosial kemasyarakatan, pemerintahan, politik, pariwisata, seni budaya, ekonomi, hukum dan HAM, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi informasi, pemuda dan olahraga, agrikultur, tenaga kerja dan imigrasi); tone berita (positif, netral, dan negatif); tipe media (cetak/online); dan media yang digunakan.

Berdasarkan pengumpulan data penelitian kuantitatif, untuk mengetahui tema kebijakan, tone pemberitaan, serta tindak lanjut dari pemberitaan yang paling mendominasi selama kuartal pertama 2023, ditemukan hasil pemberitaan sebanyak 1.749 berita. Bulan Januari sebanyak 477 berita, bulan Februari 480 berita, bulan Maret 784 berita, dan bulan April 8 berita. Media yang digunakan paling banyak adalah media online sebanyak 904 berita dibandingkan dengan media cetak 845 berita. Tone berita paling mendominasi selama kuartal pertama 2023 dari Januari hingga April yaitu netral sebanyak 1.141 berita, positif 512 berita, dan negatif 61 berita.

#### Tahapan Pendekatan Kualitatif

Pada tahap pengumpulan data kedua, penulis melaksanakan wawancara kualitatif untuk mengkonfirmasi kebijakan, tone pemberitaan, dan tindak lanjut pemberitaan yang mendominasi di kuartal pertama 2023. Data dikumpulkan melalui tiga informan yang

relevan berdasarkan teknik *homogen purposive sampling*. Penulis memilih individu relevan yang memiliki kesamaan sifat dan keahlian dalam topik tersebut. Karena ketiga informan tersebut karena ketiganya merupakan staff khusus analisis E-Clip Jabar. Mulyana (dalam Effendi, dkk, 2021) menyatakan bahwa fokus utama dalam *purposive sampling* bukan hanya mengandalkan kuantitas serta generalisasi, namun berfokus pada individu tertentu yang diinginkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, ketiga informan yang berperan sebagai data analisis media monitoring pemberitaan Pemprov Jabar di Biro Administrasi Pimpinan melalui E-Clip diwawancarai. Wawancara berlangsung memakan waktu kurang lebih satu jam serta prosesnya direkam oleh *voice audio*. Penulis memfokuskan pertanyaan wawancara untuk mengkonfirmasi mengenai hasil data yang telah diperoleh pada hasil analisis kuantitatif, sebagai berikut (1) alasan tema tersebut menjadi paling tinggi mendominasi dan tindak lanjutnya, (2) kesesuaian dengan data dan fakta di lapangan, dan (3) dominasi *tone* pemberitaan paling banyak. Penulis selanjutnya mengumpulkan keseluruhan data serta menguraikannya dalam hasil penelitian. Kombinasi wawancara dan analisis isi memberikan penulis data yang kaya dan komprehensif sebagai dasar analisis.

## Analisis Data

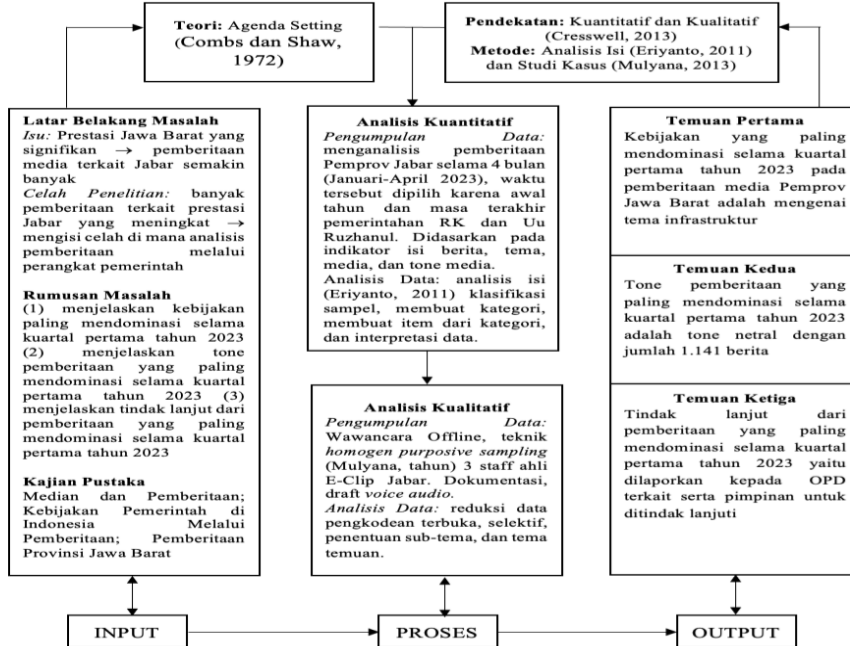
Penulis menggunakan model *content analysis* Eriyanto (2011) yang mencakup; klasifikasi sampel, pembuatan kategori, pengkodean, pembuatan item berdasarkan kriteria memperoleh data, terakhir interpretasi data yang diperoleh. Setelah dikumpulkan, disortir serta diberi kode tema guna mengidentifikasi jenis kebijakan serta tone berita. Selanjutnya, penulis mengidentifikasi jumlah kode tema yang telah dianalisis baik dari kebijakan ataupun tone berita yang muncul. Setelah itu, tema dianalisis perbulan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil hitung tema dan tone pemberitaan paling dominan selama satu kuartal pertama tahun 2023 tersebut.

Tahap berikutnya terkait analisis data kualitatif, penulis melakukan pengkodean secara terbuka dengan memberikan makna pada setiap kalimat hasil wawancara informan. Dilanjutkan dengan pengkodean selektif untuk mengkategorikan kode dari siklus koding sebelumnya yang mempunyai makna sama. Kemudian mereduksi sub-tema penelitian. Selanjutnya menyatukan kategori setiap kode yang memiliki kesinambungan sehingga menciptakan sub-tema yang menghantarkan kepada tema temuan penelitian.

Dengan metode analisis tersebut, memberikan kesempatan pada penulis untuk menggabungkan pengetahuan dan pengalaman para informan mengenai kebijakan serta tone pemberitaan Pemprov Jabar melalui E-Clip yang dikerjakan guna mengkonfirmasi hasil

temuan pertama yang dilakukan yaitu analisis isi pemberitaan. Penulis mentranskripsikan hasil wawancara, memberikan kode, dan mengkategorisasikan kode tersebut ke dalam tema konseptual yang lebih luas. Dimana tema ini selanjutnya dipersempit serta disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu kemunculannya. Secara ringkas, keseluruhan proses dan konsep penelitian dirumuskan dalam kerangka konseptual (lihat Gambar di bawah).

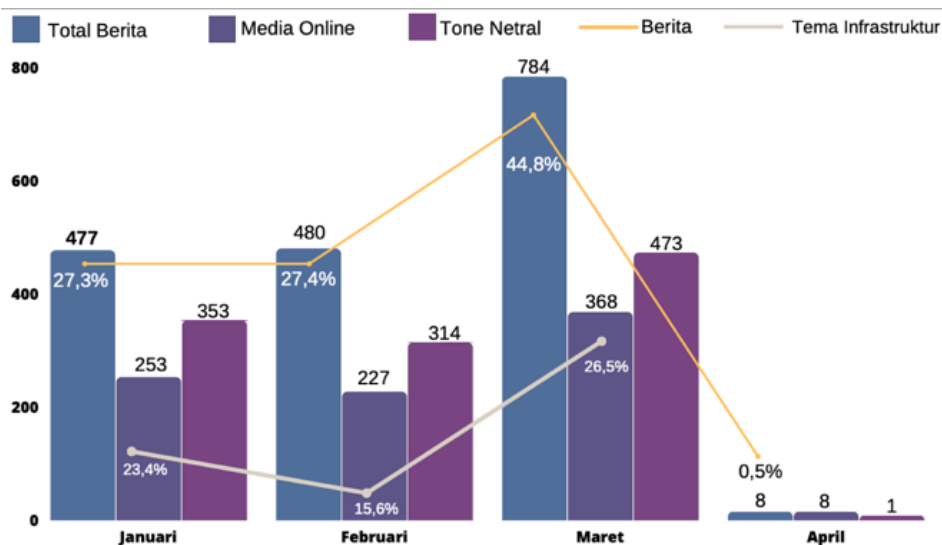
Proses : ...  
pandua



Gambar 1. Konseptual Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Paling Mendominasi Selama Kuartal Pertama Tahun 2023



Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jabar

Gambar 2. Hasil Temuan Penelitian Kuantitatif

Penelitian ini mengidentifikasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat paling mendominasi pada pemberitaan media melalui E-Clip selama kuartal pertama tahun 2023. Bulan Januari kebijakan mendominasi adalah kesehatan dan infrastruktur. Kesehatan menjadi tema yang signifikan sebesar 26,1% berita yang dianalisis. Diikuti infrastruktur sebesar 23,4% berita yang dianalisis. Bulan Februari, pemberitaan kebijakan paling mendominasi adalah infrastruktur dan sosial kemasyarakatan. Infrastruktur menjadi tema pertama yang mendominasi sebesar 16,7% berita yang dianalisis. Sosial kemasyarakatan menjadi tema kedua yang mendominasi sebesar 15,6% berita. Bulan Maret merupakan bulan dengan jumlah pemberitaan paling banyak dan kebijakan paling mendominasi yaitu tema infrastruktur dan sosial kemasyarakatan. Infrastruktur menjadi tema yang paling mendominasi sebesar 26,5% berita yang dianalisis. Sosial kemasyarakatan menjadi tema kedua yang mendominasi sebesar 14,9% berita yang dianalisis. Terakhir, bulan April kebijakan yang paling dominan diberitakan yaitu tema sosial kemasyarakatan sebesar 26,1%, dan tema kesehatan sebesar 23,4% berita yang dianalisis melalui E-Clip.

Dapat disimpulkan kebijakan paling mendominasi selama satu kuartal pertama 2023 adalah tema infrastruktur. Karena infrastruktur merupakan salah satu kebijakan yang diutamakan pemerintah dalam membangun Jawa Barat. World Bank (dalam Panjaitan, dkk, 2019) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan serangkaian struktur yang saling tergabung dengan aspek lain sehingga membentuk sebuah rangka yang menyokong keseluruhan struktur.

Untuk mengkonfirmasi temuan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan staff khusus E-Clip Jabar. Seperti yang disampaikan salah satu informan bahwa kebijakan infrastruktur merupakan tema paling dominan dalam analisis pemberitaan E-Clip.

*"Infrastruktur menjadi salah satu pembangunan yang memperlihatkan sejauh mana daerah tersebut berkembang. Sama dengan Jawa Barat, janji pemerintah yang akan memajukan infrastruktur semakin gencar terkait pembangunan akses jalan, bendungan, alun-alun, dan fasilitas publik lainnya. Sehingga menjadikan kebijakan tema infrastruktur banyak diberitakan".*

Pernyataan tersebut didukung kedua informan selanjutnya yang menekankan bahwa pada awal tahun akan banyak berita mengenai pembangunan infrastruktur yang dilakukan hingga selesai pembangunan. Selain itu, tahun 2023 merupakan tahun terakhir jabatan pemimpin Jabar melakukan bakti dan pemerintahan (P02-P03). Dapat disimpulkan bahwa kebijakan infrastruktur mendominasi pemberitaan karena salah satu tolak ukur adanya kemajuan suatu daerah yang menunjukkan kinerja pemerintahan daerah tersebut. Crescenzi dan Pose (2012) mengungkapkan infrastruktur memiliki peran penting dalam



pembangunan. Adanya infrastruktur yang memadai adalah faktor pendukung kemajuan produktivitas daerah (Panjaitan, dkk, 2019).

Bulan Januari kebijakan kesehatan mendominasi karena berita keracunan makanan cikibul dan informasi stunting di Jabar. Ketiga informan mengungkapkan berita kesehatan naik karena kasus keracunan nitrogen cikibul, banyak korban anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Anak-anak tertarik mengonsumsi cikibul karena menarik namun ternyata berbahaya. Mereka setuju bahwa informasi stunting memang program yang digencarkan pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Jabar dan melahirkan generasi emas (P01, P02, dan P03). Hal ini menunjukkan pemberitaan kesehatan sangat penting. Karena bermanfaat bagi kesadaran kesehatan yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup masyarakat. Pentingnya kebijakan kesehatan karena keputusan, program dan aksi dilaksanakan mencapai tujuan kesehatan yang kompleks berhubungan dengan hajat hidup orang banyak serta ketidakpastian kondisi suatu sakit (Ayuningtyas, 2014).

Kebijakan infrastruktur karena masyarakat menagih janji kepada pemerintah terkait pembangunan di Jabar. Kedua informan menyatakan masyarakat menagih janji perbaikan jalan, alun-alun, janji masa kampanye dulu, untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat (P01, P02). Pernyataan tersebut didukung oleh informan selanjutnya yang menyatakan infrastruktur adalah visi misi pembangunan pemerintah berbentuk fisik dan menunjukkan kinerjanya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan infrastruktur berkaitan dengan janji pemerintah dalam membangun daerah. Grigg (dalam Panjaitan, dkk, 2019) menyatakan infrastruktur merujuk pada pembangunan fisik dalam menyediakan fasilitas publik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Bulan Februari infrastruktur menjadi kebijakan mendominasi. Karena infrastruktur program yang diperhatikan Pemerintah. Kedua informan menyatakan pembangunan infrastruktur di Jabar untuk menumbuhkan ekonomi melalui investor dan wisatawan, mempermudah mobilitas masyarakat melalui pembangunan fasilitas yang ditingkatkan. Pemerintah fokus membangun pemerataan infrastruktur di Jawa Barat yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya (P01-P02). Hal ini menunjukkan infrastruktur mendominasi karena pemerintah ingin memfokuskan kembali pembangunan di Jabar yang sempat terhenti pandemi Covid-19. Infrastruktur dibutuhkan karena mendorong pertumbuhan ekonomi. Menghadirkan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan. Pembangunan infrastruktur yang memadai akan menjamin efisiensi (Prasetyo dan Firdaus 2009). Kebijakan sosial kemasyarakatan juga mendominasi, para informan menyebutkan karena satu bulan sebelum menyambut Ramadhan. Mereka setuju saat akan menyambut Bulan Ramadhan, harga pangan dan

sembako sering diberitakan. Ditambah kasus bullying sering terjadi dan dampaknya berbahaya sekali (P01, P02, dan P03). Dari pernyataan tersebut menyatakan sosial kemasyarakatan mendominasi karena berhubungan dengan penyambutan Ramadhan.

Bulan Maret pemberitaan paling banyak. Kebijakan mendominasi infrastruktur dan sosial kemasyarakatan. Para informan menyetujui bahwa bulan Maret memang perbaikan infrastruktur diutamakan untuk mempermudah mobilitas pemudik. Secara nasional menyambut Hari Raya Idul Fitri 2023. Mayoritas penduduk Indonesia muslim, sehingga berita terkait hari besar keagamaan meningkat (P01, P02, P03). Selain itu, karena pemerintah fokus membangun fasilitas publik. Hal ini diungkapkan seorang informan bahwa pemerintah menghadirkan jalan alternatif, mempersiapkan posko kesehatan dan istirahat pemudik yang diatur oleh setiap Kepala Daerah dan Forkopimda. Hal tersebut menunjukkan kebijakan infrastruktur mendominasi karena pemerintah mengutamakan perbaikan sarana prasarana untuk kesejahteraan masyarakat (Panjaitan, dkk, 2019).

Sosial kemasyarakatan mendominasi selain menyambut Hari Raya Idul Fitri serta menginformasikan kepada masyarakat informasi sosial. Seorang informan berkata sosial kemasyarakatan mendominasi karena permasalahan pangan sembako terkait harga yang naik dan sulit dicari, sehingga pemerintah bertindak tegas. Informan selanjutnya mengungkapkan karena informasi pulang kampung. Informasi mudik dan keamanan untuk pemudik didirikan posko istirahat, kesehatan, atau informasi rute alur jalan bagi pemudik. Pemberitaan sosial kemasyarakatan meningkat karena pemerintah menginformasikan berita yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Midgley (2009) membagi kebijakan sosial menjadi 1) kebijakan sosial dimengerti sebagai program yang dijalankan oleh pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 2) kebijakan sosial dimengerti sebagai kegiatan akademik mencakup deskripsi, eksplanasi, evaluasi kebijakan sosial.

Bulan April kebijakan mendominasi adalah sosial kemasyarakatan. Karena masih terdapat nuansa Hari Raya. Informasi terkait arus balik bagi para pemudik mendominasi. Selain itu, terdapat pemberitaan yang tidak teranalisis melalui E-Clip. Seorang informan mengungkapkan terdapat berita yang *vira*/di bulan April, seperti Wali Kota Bandung terjerat OTT, wisuda anak almarhum Ridwan Kamil, dan mempertanyakan arah politik yang akan diambil oleh Ridwan Kamil. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa sosial kemasyarakatan mendominasi karena informasi arus balik Idul Fitri dan informasi yang tidak terdapat di E-Clip yang terjadi sesuai fakta di lapangan sehingga pemberitaan naik.

Temuan pada penelitian ini berkaitan dengan pernyataan Combs dan Shaw (dalam Agustina dan Irwansyah, 2017) menyatakan bahwa *agenda setting* menentukan isu yang dinilai penting pada media massa akan dianggap penting juga oleh masyarakat yang dapat

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang difokuskan kepada publik (Herlina, 2021). Untuk menyebarluaskan program kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah kepada masyarakat, pemerintah berupaya dengan memanfaatkan media sebagai perantaranya. (Nur, 2021). Selaras dengan hal tersebut, Pemprov Jabar memanfaatkan penggunaan media untuk menyalurkan informasi terkait kebijakan yang dibentuknya kepada publik sebagai upaya memberikan informasi terkini kepada masyarakat untuk kemajuan bersama (RKPD Pemprov Jabar, 2021).

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang meningkat setiap wilayah di Indonesia mengalami kemajuan, termasuk Jawa Barat. Hadirnya media massa dan banyaknya kebijakan pemerintah membawa pengaruh meningkatkan berita media untuk publik (Baharuddin, 2013). Hasil temuan ini selaras dengan penelitian Fauziati (2021), kebijakan pemerintah Indonesia dilihat dari pemberitaan memiliki berbagai macam sudut pandang. Bagaimana media memandangnya berfokus pada tema tertentu sesuai dengan kepentingan isu. Pemberitaan media terkait dengan kebijakan dapat menggiring opini masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah (Rustam, 2022).

### Tone Pemberitaan Paling Mendominasi Selama Kuartal Pertama Tahun 2023

Hasil penelitian tone pemberitaan paling mendominasi selama kuartal pertama tahun 2023 bulan Januari hingga April adalah tone netral. Pemberitaan tone netral selama satu kuartal pertama 2023 ditemukan hasil sebesar 66,4% yang dianalisis melalui E-Clip. Bulan Januari pemberitaan dengan tone netral sebesar 75,7%, bulan Februari sebesar 67,5%, bulan Maret sebesar 61,2%, dan terakhir bulan April sebesar 12,5%. Untuk tone positif memiliki persentase sebesar 29,8%. Dan untuk tone negatif memiliki persentase sebesar 3,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pada pemberitaan kebijakan Pemprov Jabar memiliki lebih banyak pemberitaan tone netral dibandingkan tone negatif maupun positif.

Tone netral mendominasi berarti pesan yang disampaikan tidak memiliki sentimen apapun. Berita hanya menyampaikan informasi yang tidak memiliki masalah. Berbeda dengan tone positif menunjukkan adanya kemajuan kinerja pemerintah. Sedangkan tone negatif memiliki permasalahan dalam berita terkait dengan pemerintah dan kinerjanya.

Untuk mendukung hal tersebut, peneliti mengkonfirmasi dengan melakukan wawancara. Ketiga informan setuju tone pemberitaan lebih banyak netral yang dianalisis melalui E-Clip. Mereka menyetujui karena tidak ada sentimen yang mengandung berita negatif dan tidak memiliki permasalahan apapun (P01, P02, P03). Hal ini menunjukkan berita mengenai Jawa Barat memang lebih banyak tone netral. Karena pemberitaan hanya sebatas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemberitaan

negatif dapat dinetralkan tone beritanya jika permasalahan tersebut sudah selesai (Eisenmann, 2012). Selain itu, pemberitaan yang diangkat ke media faktanya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Para informan mengungkapkan bahwa berita yang hadir di tengah masyarakat merupakan berita dengan isu hangat. Media tertarik menaikkan isu tersebut karena sedang terjadi (P01, P02, P03). Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan yang diangkat ke media adalah berita yang tengah terjadi di masyarakat. Dimana berita tersebut benar apa adanya sesuai fakta di lapangan. Pemberitaan kebijakan pemerintah dinilai selaras dengan yang disampaikan, meskipun komunikasi publik yang dipakai oleh pemerintah dapat menentukan arah narasi pemberitaan media (Herlina, 2021).

Nada berita media lebih banyak netral karena berita dominan bersifat informatif. Seorang informan menyatakan pemberitaan tema kebijakan sosial kemasyarakatan yang menyangkut informasi mobilitas pemudik lebih banyak dinetralkan. Sedangkan tone negatif didominasi oleh kebijakan kesehatan dan infrastruktur. Menurut seorang informan, berita kesehatan dan infrastruktur mendominasi terkait kurangnya fasilitas kesehatan dan perbaikan jalan di Jabar. Apabila ada isu yang terjadi dengan tone negatif akan ditindaklanjuti kepada pihak bersangkutan melalui pemberitahuan. Sejalan dengan teori *agenda setting* bahwa isu terkait dengan kebijakan tersebut hadir sebab terdapat perbedaan persepsi baik itu oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat (Putri, dkk, 2022).

### Tindak Lanjut Pemberitaan Kebijakan Mendominasi Selama Kuartal Pertama 2023

Hasil penelitian terkait tindak lanjut pemberitaan kebijakan mendominasi selama kuartal pertama tahun 2023 dilakukan dengan wawancara dari berita yang telah dianalisis. Para informan menyetujui tindak lanjut yang diberikan dengan memberikan laporan terhadap pimpinan. Mereka setuju bahwa kegiatan yang dilakukan dalam analisis pemberitaan Pemprov Jabar melalui E-Clip hanya melakukan analisis media monitoring (P01, P02, P03). Terkait tindak lanjut lebih dominan terhadap berita negatif. Karena tone negatif menunjukkan terdapat permasalahan mengenai kinerja pemerintah yang belum terselesaikan. Seorang informan menyatakan bahwa setelah dibuatkan laporan kepada perangkat daerah yang tercantum memiliki permasalahan selanjutnya kewenangan diserahkan kepada pimpinan dan perangkat daerah tersebut.

Seorang informan mengungkapkan sebagai contoh terdapat berita tema sosial kemasyarakatan memiliki tone negatif menuliskan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terkait harga pangan dipasaran tidak sesuai. Hal ini akan disampaikan kepada Disperindag dan dibuatkan laporan. Tindak lanjutnya Disperindag akan berdiskusi menyampaikan solusi secara langsung kepada media atau disampaikan kepada Gubernur. Informan lainnya

menuturkan terkait tindak lanjut dari kebijakan kesehatan yang mendominasi bulan Januari, terdapat berita kurangnya Rumah Sakit di Jabar, kemudian dilaporkan kepada Dinas Kesehatan yang nantinya akan didiskusikan. Hal ini menunjukkan dengan hadirnya tendensi pada media pemberitaan berkembang terus menerus. Terkadang media memberitakan kebijakan pemerintah dalam bentuk opini negatif yang lebih cenderung membahas kegagalan atau permasalahan yang timbul dari program itu (Elfrida, 2015). Temuan ini sejalan dengan teori *agenda setting* yang memuat isu mengenai kebijakan sebagai hasil dari hadirnya berbagai pendapat yang akan dipilih oleh pemerintah. Isu terkait dengan kebijakan tersebut hadir karena permasalahan atau perbedaan persepsi (Putri, dkk, 2022).

## SIMPULAN

Kajian eksploratif ini berupaya mengidentifikasi kebijakan infrastruktur, berita bersifat netral yang mendominasi pemberitaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui E-Clip sebagai aplikasi monitoring berita dalam memfasilitasi tindakan yang tepat dalam menanggapi isu yang disorot media. Pemprov Jabar memanfaatkan media menyalurkan informasi kebijakan untuk disebarkan kepada publik. Diharapkan penelitian ini lebih membuka pemahaman bahwa media sangat penting dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi program pemerintah sekarang ini. Dukungan perlu diberikan kepada semua pihak khususnya pemerintah dalam mengambil program kebijakan bagi masyarakat dan media dalam menuliskan pemberitaan sesuai fakta. Penelitian ini diharapkan dapat lebih dikembangkan pada masa mendatang dengan penelitian kepada pihak media yang menuliskan pemberitaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T. & Irwansyah. (2017). *Peran Agenda Setting Media Massa Dalam Kebijakan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Oleh Pemerintah*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. 8(2). 227-236.
- Amini, A. S. (2022). *Pers Sebagai Watch Dog di Era Digital*. [Online]. Diakses pada <http://econochannelfeunj.com/2022/11/pers-sebagai-watchdog-di-era-digital/>
- Argawidyanti, N. T. (2022). *Analisis Framing Media Pemberitaan Online Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Penanganan Covid-19*. Program Studi Politeknik Indonesia Rerapan.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Baharuddin. (2013). Interaksi Positif Pers, Pemerintah dan Masyarakat. *Jurnal Al-Bayan*. 19(27). 111-121.
- Bappeda Jabar. (2021). Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diakses pada <https://bappeda.jabarprov.go.id/documents/rencana-kerja-pemerintah-daerah-provinsi-jawa-barat-tahun-2021-2/>
- Brooks, F. B., Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (1996). Qualitative Interviewing: The art of hearing data. *The Modern Language Journal*, 80(4), 555-556.
- Crescenzi, R. & Pose, R. A. (2012). *Infrastructure and regional growth in the European Union*. Papers in Regional Science. 91(3). P. 478-513.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, quantitative, and mix methods approaches (4<sup>th</sup> ed.)*. Sage Publications, Inc.
- Effendi, R., Sukmayadi, V., Unde, A. A., Triyanto. (2021). Social media as a medium of preventing radicalization (a case study of an Indonesian youth community Instagram counter-radicalization initiatives). Plaridel. Advance online publication. <https://doi.org/10.52518/2021-14edut>
- Eisenmann, M. (2012). *Proposed Interim Standards for Metrics in Traditional Media Analysis*. Institute for Public Relations. Retrieved from Institute for Public Relations: <https://instituteforpr.org/proposed-interim-standards-for-metrics-in-traditional-media-analysis-2/>
- Elfrida, S. V. (2016). *Proses Membangun Agenda Setting Kebijakan Pada Portal Berita Pemerintah dan Kesesuaiannya dengan Agenda Media Online*. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*. 6(1): 13–26.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauziati, C. (2021). *Analisis Framing Pemberitaan Media Daring Tentang Citra Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Kompas dan Detik.com)*. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. 24(2). 207-222.
- Herlina, O. (2021). *Analisa Framing Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 di Media Online*. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*. 3(1). DOI: <https://doi.org/10.24843/JIWSP.2021.v03.i01.p01>
- Humas Jabar. (2019). Ridwan Kamil: Media Berperan Mendewasakan Masyarakat Mengolah Informasi. PPID Jabar. [Online]. Diakses pada; <https://ppid.jabarprov.go.id/posting/read/1483-ridwan-kamil-media-berperan-mendewasakan-masyarakat-mengolah-informasi>
- Kriyantoro, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

- Mauliansyah, F. (2018). *MIRROR ON THE WALL; Refleksivitas Keberpihakan Media Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014*. Program Studi Ilmu Komunikasi. Universitas Teuku Umar.
- Midgley, J., & Michelle, L. (2009). *The Handbook of Social Policy*. California: SAGE Publications Ltd.
- Mulyana, D. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- Nan. (2022). *Kolaborasi Pemerintah dan Media Massa untuk Komunikasi Publik yang Efektif. Humas MENPANRB*. [Online]. Diakses pada: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kolaborasi-pemerintah-dan-media-massa-untuk-komunikasi-publik-yang-efektif>
- Nur, E. (2021). *Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online*. Jurnal Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa. 2(1). p; 51-64.
- Panjaitan, M. A. H., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2019). *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. 8(1). 43-61.
- Prasetyo, F. (2009). *Pengaruh Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. 2(2). 222-236.
- Putri, H. N. (2022). *Media dan Pemerintahan Saling Membutuhkan*. DiskominfoKaltim. [Online]. Diakses pada <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/media-dan-pemerintahan-saling-membutuhkan>
- Rahmawati, E. D. (2020). *Modul Praktikum Komunikasi Pemerintahan*. The Journal Publishing. Sleman Yogyakarta.
- Rustam, M. (2022). *Analisis Isi Pro Kontra Pemberitaan Media Massa di Harian Fajar terhadap Kebijakan Di Rumah Saja*. Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi. 10(1). DOI 10.30656/lontar.v10i1.3028
- Sunarti. (2021). *Agenda Setting Pemberitaan Covid-19 dan Pelarangan Mudik Pada Media Online di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. IAIN Parepare.
- Teguh, R. (2023). *5 Tahun Jabar Juara Ridwan Kamil: Terus Jaga Prestasi Jawa Barat*. Jabarprovgoid. [Online]. Diakses pada: <https://jabarprov.go.id/berita/5-tahun-jabar-juara-ridwan-kamil-terus-jaga-prestasi-jawa-barat-10134>
- Tempo. (2023). Diakses pada <https://nusantara.tempo.co/nusantara/1357/pemprov-jabar-raih-541-penghargaan-era-kepimpinan-ridwan-kamil>